

Hilirisasi Sawit Jangan Berakhir Jadi "Rebutan CPO"

Hilirisasi sawit membuka peluang nilai tambah besar, tetapi juga meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri. Ketika energi, pangan, oleokimia, ekspor, dan stok sama-sama membutuhkan pasokan, hilirisasi perlu dikelola berbasis neraca sawit yang kuat. Tanpa penguatan produktivitas hulu, peremajaan kebun, dan tata kelola pasokan, agenda hilirisasi berisiko berubah menjadi kompetisi bahan baku antarsektor.

**Selengkapnya di halaman 2*

Sawit dalam Peta SAF Global: Dari POME Oil, OPT, hingga Pengakuan CORSIA

Sawit Indonesia mulai masuk dalam peta Sustainable Aviation Fuel (SAF) global melalui pengusulan POME oil dan Oil Palm Trunk dalam kerangka CORSIA. Pengakuan ini menunjukkan bahwa feedstock sawit dapat diterima jika didukung data, metodologi LCA, dan argumentasi ilmiah yang kredibel. Momentum ini perlu dijaga melalui penguatan *traceability*, tata kelola *feedstock*, produktivitas, serta diplomasi teknis yang lebih aktif.

**Selengkapnya di halaman 8*

Menata Ulang Keberlanjutan Pabrik Kelapa Sawit Berbasis Neraca TBS Wilayah

Keberlanjutan PKS tidak cukup dinilai dari kepemilikan kebun, tetapi dari keseimbangan antara kapasitas pengolahan dan pasokan TBS di suatu wilayah. Jika kapasitas PKS melampaui potensi produksi TBS, risiko persaingan bahan baku, lemahnya ketertelusuran, dan tekanan keberlanjutan akan meningkat. Karena itu, Neraca TBS Wilayah penting sebagai dasar penataan industri pengolahan sawit.

**Selengkapnya di halaman 10*



Dr. Darmin Nasution



Dr. Sofyan A. Djalil

Industri sawit Indonesia tengah memasuki fase baru ketika agenda hilirisasi, energi, dan keberlanjutan bergerak semakin bersamaan. Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel, pangan, oleokimia, dan ekspor menuntut pengelolaan neraca sawit yang lebih hati-hati agar hilirisasi tidak berubah menjadi kompetisi bahan baku. Di sisi lain, tekanan harga TBS menunjukkan bahwa petani masih menjadi mata rantai paling rentan ketika pasar terganggu, sementara peluang SAF global membuka ruang baru bagi feedstock sawit seperti POME oil dan Oil Palm Trunk. IPOSS Insights edisi ketujuh belas membahas arah baru industri sawit Indonesia dalam memperkuat nilai tambah, menjaga keseimbangan pasokan, dan membangun daya saing yang lebih berkelanjutan.

Hilirisasi Sawit Jangan Berakhir Jadi “Rebutan CPO”

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut hilirisasi sawit, kelapa, dan gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun, atau setara sekitar 10 tahun APBN. Klaim ini menunjukkan besarnya ruang ekonomi dari komoditas perkebunan Indonesia. Namun, dalam konteks sawit, isu yang perlu dibaca lebih jauh bukan hanya seberapa besar nilai tambah yang dapat diciptakan, melainkan bagaimana CPO dialokasikan ketika semakin banyak sektor sama-sama membutuhkannya.

Selama ini, sawit sering dibaca sebagai komoditas ekspor dan bahan baku minyak goreng. Padahal, perannya semakin luas. CPO dan turunannya digunakan untuk biodiesel, oleokimia, kosmetik, sabun, deterjen, surfaktan, pelumas, hingga berbagai bahan kimia berbasis nabati. Semakin banyak produk hilir yang dikembangkan, semakin besar pula peluang nilai tambah yang dapat ditahan di dalam negeri. Namun, semakin luas pula kebutuhan bahan baku yang harus dipenuhi.

Data IPOSS menunjukkan ruang pasokan sawit tidak bisa dibaca terlalu longgar. Dalam Outlook Sawit Indonesia 2026, IPOSS memproyeksikan produksi minyak sawit nasional tumbuh moderat hingga sekitar 49,8 juta ton pada 2026. Sementara itu, produksi CPO dan CPKO hingga akhir Semester I/2026 diperkirakan sekitar 23,7 juta ton, sedikit lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2025 sebesar 24,0 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa tambahan kebutuhan bahan baku untuk hilirisasi tidak berdiri di atas ruang produksi yang sangat longgar. Dengan kata lain, ekspansi hilir perlu dibaca bersama kapasitas pasokan di hulu.

Tantangannya menjadi lebih besar ketika serapan sawit untuk energi meningkat. Reuters mencatat bahwa kebutuhan biodiesel dapat naik dari sekitar 15,64 juta kiloliter pada B40 menjadi sekitar 20,1 juta kiloliter per tahun jika B50 berjalan penuh. Pada saat yang sama, produksi sawit diperkirakan hanya tumbuh sekitar 5%. Kondisi ini membuat kenaikan konsumsi domestik perlu dihitung secara hati-hati agar tidak

menekan kebutuhan pangan, oleokimia, ekspor, maupun stok akhir.

Di sinilah neraca sawit menjadi penting. Hilirisasi tidak cukup hanya dibaca dari jumlah pabrik, jenis produk turunan, atau potensi nilai tambah. Pemerintah dan industri juga perlu melihat berapa CPO yang tersedia, berapa yang diserap untuk energi, berapa yang dibutuhkan untuk pangan dan oleokimia, serta berapa ruang yang tersisa untuk ekspor dan stok akhir. Tanpa perhitungan tersebut, hilirisasi berisiko berubah dari agenda peningkatan nilai tambah menjadi kompetisi bahan baku.

Risiko ini tidak kecil. Ketika konsumsi domestik meningkat, ruang ekspor dapat menyempit. Padahal, ekspor sawit masih menjadi sumber devisa sekaligus sumber pungutan ekspor yang ikut menopang pembiayaan program biodiesel. Reuters juga mencatat bahwa kenaikan konsumsi domestik dapat menekan volume ekspor sawit. Jika ekspor berkurang, penerimaan dari pungutan ekspor sawit atau *levy* juga berpotensi menurun, padahal dana tersebut ikut digunakan untuk mendukung program biodiesel.

Karena itu, hilirisasi sawit jangan sampai berakhir menjadi rebutan CPO. Agenda nilai tambah perlu berjalan bersama penguatan hulu, mulai dari peningkatan produktivitas kebun, peremajaan tanaman tua, penggunaan benih unggul, efisiensi pabrik, hingga tata kelola stok dan data produksi yang lebih rapi. Jika produksi tidak diperkuat, industri hilir memang bisa tumbuh, tetapi tekanan terhadap bahan baku juga akan semakin besar.

Hilirisasi sawit seharusnya diarahkan untuk memperbesar nilai ekonomi tanpa mengorbankan keseimbangan pasokan. Energi, pangan, oleokimia, ekspor, stok, dan kepentingan petani perlu ditempatkan dalam satu neraca yang sama. Dengan begitu, CPO tidak sekadar diperebutkan oleh banyak sektor, tetapi dikelola sebagai bahan baku strategis yang menopang nilai tambah, ketahanan energi, dan daya saing sawit Indonesia. (JH)



MinyaKita Dikelola BUMN, Apakah Harga Minyak Goreng Bisa Lebih Stabil?

Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar MinyaKita dikelola 100 persen oleh BUMN. Arahannya ini menarik karena MinyaKita bukan sekadar minyak goreng kemasan sederhana, tetapi simbol kehadiran negara dalam menjaga harga pangan masyarakat. Dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter, publik tentu berharap minyak goreng ini benar-benar tersedia dengan harga yang sesuai di pasar.

Namun, persoalan MinyaKita tidak hanya soal harga murah. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana membuat harga tetap terjangkau tanpa membuat pasokan tersendat. Dalam banyak kasus, barang yang harganya dikendalikan negara bisa menghadapi dua risiko sekaligus: harga diharapkan tetap rendah, tetapi pelaku rantai pasok tetap membutuhkan margin yang cukup agar mau memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk tersebut.

Di sinilah pengelolaan oleh BUMN menjadi penting untuk dianalisis. Pertanyaannya bukan sekadar apakah BUMN akan menjadi pengelola baru, tetapi apakah BUMN mampu menjalankan fungsi penyangga pasar. Fungsi ini berarti BUMN tidak hanya mengurus administrasi program, tetapi juga mampu memastikan ketersediaan stok, membaca kebutuhan pasokan di tiap daerah, dan mempercepat distribusi ketika terjadi kelangkaan atau tekanan harga. Dengan kata lain, BUMN tidak cukup hanya hadir sebagai pemegang program, tetapi harus mampu menjadi penghubung antara produsen, distributor, pedagang, dan konsumen.

Dampak positifnya bisa terasa jika rantai distribusi menjadi lebih pendek dan lebih transparan. Pemerintah dapat lebih mudah mengetahui berapa volume MinyaKita yang diproduksi, ke mana barang dikirim, daerah mana yang kekurangan pasokan, dan di titik mana harga mulai bergerak di atas HET. Jika data ini terbaca dengan baik, stabilisasi harga tidak lagi hanya mengandalkan operasi pasar sesaat, tetapi berbasis pengelolaan stok dan distribusi yang lebih terukur.

Namun, risiko kebijakan ini juga tidak kecil. Jika pengelolaan terlalu terpusat tetapi tidak diikuti kesiapan logistik, distribusi bisa melambat. Jika formula harga dan margin tidak jelas, produsen atau distributor bisa kurang tertarik memasok MinyaKita. Mereka dapat memilih mengalihkan produksi ke minyak goreng komersial yang lebih fleksibel secara harga. Dalam kondisi seperti itu, harga memang ditetapkan murah, tetapi barangnya justru sulit ditemukan.



Karena itu, keberhasilan MinyaKita di tangan BUMN tidak bisa hanya dilihat dari harga yang ditetapkan di tingkat produsen atau distributor. Ukuran yang lebih penting adalah harga yang benar-benar dibayar konsumen di tingkat pengecer. Bisa saja perusahaan menjual sesuai ketentuan, tetapi harga naik drastis ketika sampai di pasar atau toko ritel. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat bisa menemukan produk tersebut secara mudah, dengan harga yang wajar, dan dalam jumlah yang cukup. Sebab, ketika pasokan tidak merata, harga di pasar dapat naik mengikuti hukum permintaan dan penawaran: daerah yang kekurangan barang akan menghadapi tekanan harga yang lebih tinggi.

MinyaKita juga menunjukkan bahwa tata kelola hilir tidak hanya berbicara tentang ekspor, biodiesel, atau hilirisasi bernilai tinggi. Minyak goreng rakyat adalah bagian paling dekat dari industri sawit dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, kebijakan ini perlu dirancang bukan hanya untuk mengendalikan harga, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, distributor, dan pelaku sawit di hulu.

Pada akhirnya, MinyaKita dikelola BUMN perlu dilihat secara hati-hati: apakah skema ini benar-benar mampu memperbaiki tata kelola distribusi dan pengawasan pasar, atau justru hanya memindahkan persoalan lama ke struktur pengelolaan baru. Jika logistik, margin, dan aliran pasokan tidak dibenahi, kebijakan ini berisiko tidak menjawab masalah utama. Bagi konsumen, yang paling penting tetap sederhana: minyak goreng tersedia, harganya masuk akal, dan tidak sulit dicari. (JH)

Bontang dan Ambisi Membawa Nilai Tambah Sawit Lebih Dekat ke Daerah

Rencana Bontang mendorong proyek hilirisasi sawit senilai Rp1,88 triliun, sebagaimana diberitakan oleh media lokal, menarik untuk dibaca lebih jauh. Namun, isu utamanya bukan karena sawit dapat diolah menjadi oleokimia. Industri oleokimia berbasis sawit sudah lama berkembang di Indonesia. Yang lebih menarik adalah bagaimana proyek ini mencoba membawa nilai tambah sawit lebih dekat ke daerah dan kawasan industri, sehingga sawit tidak hanya bergerak sebagai komoditas bahan mentah atau setengah jadi.

Selama ini, pembahasan sawit sering berhenti pada CPO, minyak goreng, biodiesel, atau ekspor. Padahal, sawit juga menjadi bahan baku penting bagi industri oleokimia. Oleokimia merujuk pada bahan kimia yang berasal dari minyak nabati atau lemak, dengan produk utama seperti *fatty acid*, *fatty alcohol*, *fatty amines*, *glycerol*, serta produk antara seperti surfaktan dan bahan lain yang digunakan dalam sabun, deterjen, kosmetik, pelumas, hingga kebutuhan industri.

Bontang, kota di Kalimantan Timur, menjadi lokasi yang menarik untuk proyek ini. Secara ekonomi, Bontang sudah lama berkembang sebagai kawasan industri berbasis energi, gas, pupuk, dan kimia. Dengan karakter tersebut, proyek hilirisasi sawit di Bontang dapat dibaca sebagai upaya menghubungkan bahan baku perkebunan dengan ekosistem industri yang sudah lebih dulu terbentuk.

Jika pasokan sawit, infrastruktur, energi, pelabuhan, dan pasar industrinya tersambung, Bontang berpeluang menjadi simpul baru pengolahan sawit bernilai tambah di Kalimantan Timur. Ini penting karena hilirisasi sawit tidak cukup hanya berbicara tentang pembangunan fasilitas, tetapi juga tentang bagaimana bahan baku, industri pengolahan, logistik, dan pasar pengguna dapat bergerak dalam satu rantai nilai yang saling terhubung.

Namun, proyek besar tidak otomatis menciptakan ekosistem hilir yang kuat. Nilai investasi Rp1,88 triliun baru menjadi

langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahan baku tersedia secara stabil, kualitasnya sesuai kebutuhan industri, logistiknya efisien, dan pasarnya jelas. Industri kimia berbasis sawit membutuhkan kepastian volume dan kontinuitas pasokan. Jika rantai pasok dari kebun, pabrik kelapa sawit, *refinery*, kawasan industri, hingga pasar pengguna tidak tersambung, proyek hilirisasi berisiko berdiri sebagai fasilitas besar, tetapi belum tentu menciptakan ekosistem nilai tambah yang kuat bagi daerah.

Dari sisi daerah, proyek seperti ini perlu dilihat dari dampak ekonominya, bukan hanya nilai investasinya. Data BPS Kota Bontang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka 2025 sebesar 6,36%, persentase penduduk miskin 2025 sebesar 3,21%, dan Indeks Pembangunan Manusia 2025 sebesar 83,04. Artinya, Bontang memiliki modal kualitas manusia yang relatif baik, tetapi tetap membutuhkan sumber pertumbuhan yang dapat membuka pekerjaan, memperluas kegiatan ekonomi, dan memberi ruang bagi usaha pendukung lokal.

Karena itu, keberhasilan proyek hilirisasi sawit di Bontang sebaiknya diukur dari hal-hal yang lebih konkret. Apakah bahan baku dari wilayah sekitar bisa terserap? Apakah tenaga kerja lokal mendapat ruang? Apakah jasa logistik, pergudangan, transportasi, dan usaha pendukung ikut tumbuh? Apakah produk yang dihasilkan punya pasar industri yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar hilirisasi tidak berhenti sebagai proyek besar di atas kertas.

Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah sawit bisa menjadi bahan kimia industri, karena hal itu sudah lama terbukti. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah Bontang mampu menjadikan hilirisasi sawit sebagai sumber nilai tambah yang benar-benar tinggal di daerah. Jika ekosistemnya siap, sawit tidak hanya menjadi komoditas yang dikirim keluar, tetapi juga bahan baku industri yang menciptakan pekerjaan, investasi, dan pendalaman manufaktur lokal. (JH)



B50 Mengubah Posisi Sawit dalam Sistem Energi

Saatnya RUU EBET menempatkan sawit sebagai fondasi ketahanan energi nasional.

Indonesia memasuki babak baru dalam sistem energi nasional. Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah strategis melalui penerapan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini menandai semakin besarnya peran energi nabati berbasis minyak sawit dalam penyediaan bahan bakar domestik. Mandatori tersebut tidak sekadar meningkatkan permintaan terhadap minyak sawit, tetapi juga menegaskan posisi strategisnya dalam kebijakan energi nasional.

Selama ini sawit dikenal sebagai komoditas ekspor andalan sekaligus sumber devisa, namun kini perannya meluas sebagai penopang kemampuan Indonesia mengurangi impor solar dan memperkuat ketahanan energi. Perubahan ini berlangsung cepat, dari B35 pada 2023–2024, meningkat menjadi B40 pada 2025, hingga diimplementasikan mencapai B50 pada pertengahan 2026. Meski demikian, peningkatan mandatori tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka hukum energi yang memadai, sehingga pengelolaannya masih banyak bertumpu pada kebijakan sektoral dan penyesuaian tahunan.

B50 bukan lagi sekadar instrumen hilirisasi atau penyerapan CPO. Program ini telah memengaruhi bauran energi, perdagangan, industri, dan ketahanan pasokan. Oleh karena itu, perubahan tersebut perlu ditangkap dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), agar bioenergi memperoleh tempat yang proporsional.

Diskursus energi terbarukan selama ini masih lebih banyak berpusat pada sektor pembangkit listrik. Padahal, konsumsi energi Indonesia tetap didominasi oleh bahan bakar cair untuk kebutuhan transportasi, industri, dan alat berat. Dalam konteks ini, B50 menunjukkan bahwa transisi energi juga berlangsung melalui substitusi energi fosil dengan bioenergi domestik.

Dalam konteks tersebut, RUU EBET perlu memberi kepastian arah dan ruang untuk pengembangan biofuel, mulai dari target pemanfaatan, standar kualitas, infrastruktur distribusi, hingga integrasinya dalam bauran energi nasional sebagai pilar utama. Sejalan dengan itu, ruang juga perlu dibuka bagi bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), termasuk yang memanfaatkan produk samping dan residu sawit. Dengan demikian, EBET tidak hanya menjawab kebutuhan listrik, tetapi juga energi cair lintas moda. Optimisme terhadap B50 perlu disertai kesiapan pasokan. Kebutuhan CPO untuk energi berpotensi bersaing dengan

pangan, oleokimia, dan ekspor. Jika produksi stagnan, tekanan pasokan akan membesar. Karena itu, peremajaan sawit rakyat, peningkatan produktivitas, dan efektivitas rantai pasok perlu dijadikan sebagai bagian dari agenda ketahanan energi. Selain itu, diversifikasi bahan baku perlu didorong melalui kebijakan yang memberikan insentif dan kepastian regulasi bagi pemanfaatan minyak residu seperti POME oil dan limbah minyak jelantah, sehingga memperluas basis pasokan bioenergi secara berkelanjutan.

Produktivitas tidak lagi semata menjadi persoalan perkebunan. Sebab, keberlanjutan biodiesel bergantung pada kemampuan meningkatkan produksi melalui intensifikasi, bukan hanya ekspansi. Tanpa perbaikan di hulu, mandatori dapat menghadapi keterbatasan bahan baku.

Dari sisi pembiayaan, program biodiesel memiliki mekanisme dari industri untuk industri. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, pungutan ekspor sawit dialokasikan, antara lain, untuk mendukung biodiesel. Skema ini menjadi bantalan ketika terdapat selisih harga biodiesel dan solar, sehingga program tidak secara langsung bergantung pada belanja rutin APBN.

Kekuatan mekanisme tersebut tercermin dari peningkatan alokasi insentif biodiesel, dari sekitar Rp10,8 triliun pada 2016 menjadi Rp35,5 triliun pada 2025, sebagaimana tercatat dalam laporan kinerja BPDP. Namun, daya tahannya akan terus diuji seiring peningkatan mandatori serta pergerakan harga BBM dan CPO. Selisih harga biodiesel dan solar meningkat dari Rp2.842 per liter pada 2024 menjadi Rp4.812 per liter pada 2025. Pelebaran selisih tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan program tumbuh lebih cepat dibandingkan penerimaan dari pungutan ekspor, sehingga ini dapat mempersempit ruang pendanaan biodiesel.

RUU EBET tidak perlu menggantikan mekanisme yang telah berjalan, melainkan memperkuat keberlanjutannya dan membuka ruang diversifikasi pembiayaan seiring meluasnya manfaat bioenergi. Upaya tersebut perlu ditopang oleh koordinasi kebijakan energi, perkebunan, fiskal, industri, dan perdagangan.

B50 menjadi momentum untuk membangun kerangka bioenergi yang utuh. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya mandatori, tetapi juga oleh keterpaduan pasokan, produktivitas, pembiayaan, infrastruktur, dan kepastian kebijakan. Sawit telah bergerak dari kebun menuju sistem energi. Sudah saatnya RUU EBET menempatkannya sebagai salah satu fondasi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. (FGK)

Menjaga Pasar Sawit Global di Tengah Pasokan yang Semakin Ketat

Pasar minyak sawit global semakin tersegmentasi. Eropa menekankan ketertelusuran, India fleksibel dalam mengelola bauran impor minyak nabati, sedangkan Pakistan dan Mesir semakin konsumtif serta mulai memperkuat industri pengolahan lokal. Pada saat yang sama, ruang pasokan ekspor semakin terbatas seiring meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk energi domestik di negara produsen. Kondisi ini menuntut Indonesia menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap pasar sekaligus menjaga kepastian pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Di Uni Eropa, tantangan utama terletak pada perubahan persyaratan akses pasar. Berdasarkan catatan GAPKI, ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan ini pada 2025 mencapai 3,2 juta ton senilai sekitar US\$3,78 miliar dan diserap oleh industri pangan, oleokimia, energi, serta pemurnian. Pemberlakuan EUDR mulai 30 Desember 2026 akan memperketat akses pasar melalui kewajiban pemenuhan legalitas dan bebas deforestasi yang didukung bukti geolokasi serta ketertelusuran. Karena itu, penyiapan SI-ISPO dan perluasan cakupan sertifikasi ISPO perlu diarahkan untuk memperkuat basis bukti nasional dalam mendukung proses due diligence. Bagi Eropa, kepatuhan bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi instrumen untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

India memiliki karakter berbeda. Sekitar 57% kebutuhan minyak nabati domestiknya masih dipenuhi melalui impor dan sekitar 59% dari volume impor tersebut berupa minyak sawit, berdasarkan catatan Departemen Pangan dan Distribusi Publik India. Artinya, impor bukan semata-mata keputusan oportunistik ketika harga minyak sawit lebih murah, tetapi bagian dari upaya memenuhi kesenjangan pasokan domestik. Ekspor minyak sawit Indonesia ke India pada 2025 mencapai sekitar 3,33 juta ton, dengan 83% di antaranya berupa CPO. Meskipun kebutuhannya tinggi, India dapat menyesuaikan bauran impor antara minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari berdasarkan harga, ketersediaan pasokan, serta kebijakan tarif. Mempertahankan pasar India karena itu memerlukan harga kompetitif, kepastian pasokan CPO, dan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Pakistan dan Mesir menawarkan peluang kerja sama jangka panjang. Pakistan menyerap sekitar 3,22 juta ton minyak sawit Indonesia pada 2025. Peningkatan konsumsi dan inisiatif pengembangan industri pengolahan membuka ruang bagi kontrak pasokan jangka panjang, investasi *refinery*, dan ekspor produk bernilai tambah. Sementara itu, posisi Mesir sebagai pasar konsumsi dan pintu masuk ke Afrika Utara dapat diperkuat melalui kepastian pasokan serta pengembangan jaringan perdagangan regional. Keduanya tidak semestinya hanya dipandang sebagai tujuan penjualan ketika tersedia surplus, tetapi sebagai mitra yang perlu dijaga melalui kerja sama hilir.

Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema antara menjaga pasar global dan memenuhi kebutuhan domestik yang meningkat melalui penerapan B50. Pada saat yang sama, Malaysia juga memperluas pemanfaatan biodiesel secara bertahap. Perubahan alokasi pasokan di dua negara yang menguasai lebih dari 80% produksi minyak sawit dunia tersebut dipastikan akan memengaruhi ketersediaan ekspor dan keseimbangan pasokan global.

Menurut pandangan IPOSS, ketahanan energi nasional dan keberlanjutan pasar global tidak harus dipertentangkan. Mandatori biodiesel tetap penting, tetapi pelaksanaannya perlu mempertimbangkan produksi, stok, kebutuhan pangan dan industri, serta komitmen kepada *buyer*. Pungutan ekspor dan kebijakan perdagangan juga perlu dikalibrasi agar mendukung agenda domestik tanpa mengurangi daya saing maupun kepercayaan pasar. Yang diperlukan bukan penarikan diri dari pasar global, melainkan pengelolaan ulang alokasi pasokan secara terencana.

Penurunan volume ekspor mungkin tidak terhindarkan ketika kebutuhan domestik meningkat. Namun, hubungan dengan *buyer* tidak boleh ikut menurun. Pasar yang dibangun selama bertahun-tahun mudah diisi oleh pemasok atau minyak nabati lain, tetapi belum tentu mudah direbut kembali. Indonesia mungkin tidak lagi memasok dalam volume sebesar sebelumnya, tetapi harus tetap hadir sebagai mitra yang dapat dipercaya. Pasokan dapat menyesuaikan, tetapi kepercayaan pasar harus tetap dijaga. (AF)



Disrupsi Harga TBS: Mengapa Petani Selalu Menanggung Beban Terakhir?

Setiap kali pasar sawit mengalami guncangan, petani hampir selalu menjadi pihak pertama yang merasakan pukulan. Penyebabnya jarang berasal dari kebun mereka sendiri. Tekanan dapat datang dari krisis global, pelemahan harga ekspor, penumpukan stok, ataupun perubahan kebijakan domestik. Namun, dampaknya sering berakhir pada titik yang sama: harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

Jejak kerentanan tersebut terlihat dalam beberapa periode penting. Pada krisis keuangan global 2008, harga CPO jatuh dari sekitar US\$1.400 menjadi US\$400–US\$500 per ton. Harga TBS di tingkat petani pun merosot dari kisaran Rp1.500–Rp2.000 menjadi sekitar Rp350–Rp500 per kilogram.

Tekanan kembali terjadi pada 2015 ketika perlambatan ekonomi global, rendahnya harga minyak fosil, dan persaingan minyak nabati menekan harga CPO. Harga TBS turun dari sekitar Rp1.535 per kilogram pada Januari menjadi Rp1.136 pada November. Padahal, volume ekspor minyak sawit Indonesia saat itu masih meningkat sekitar 19 persen. Artinya, tekanan terhadap petani tidak selalu terjadi karena hilangnya pasar, tetapi juga karena koreksi harga global cepat menjalar hingga ke kebun.

Pada 2022, tekanan datang dari kebijakan domestik. Larangan sementara ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya menyebabkan arus ekspor tertahan, stok meningkat, dan kapasitas pembelian pabrik menyempit. Harga TBS di sejumlah wilayah pun jatuh tajam. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan persoalan di hilir dapat menimbulkan tekanan besar di tingkat hulu apabila tidak disertai pengamanan terhadap penyerapan TBS.

Gejala serupa kembali terlihat pada 2026 ketika pasar merespons ketidakpastian transisi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berdasarkan PP No. 24 Tahun 2026. Meskipun pemerintah menegaskan perdagangan tetap berjalan, kehati-hatian eksportir, *refinery*, dan PKS selama masa transisi turut mengganggu pembentukan harga dan pembelian TBS. Pemerintah bahkan menemukan sejumlah PKS membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sumber disrupsi dapat berbeda, tetapi alur tekanannya cenderung sama. Ketika permintaan ekspor melemah, stok meningkat,

pembelian pabrik dibatasi, atau pelaku pasar menahan transaksi, tekanan harga bergerak ke hulu. Seluruh pelaku rantai pasok memang menghadapi risiko, tetapi petani menjadi pihak yang paling cepat kehilangan ruang tawar.

Kerentanan itu berkaitan dengan karakter TBS. CPO masih dapat disimpan, sedangkan eksportir dapat mengatur kontrak, volume pengiriman, dan waktu penjualan. PKS juga dapat menyesuaikan ritme pembelian ketika pasar tertekan. Petani tidak memiliki keleluasaan serupa. Setelah dipanen, TBS harus segera dijual karena keterlambatan pengolahan akan menurunkan kualitas dan rendemen minyak. Menunda panen pun bukan pilihan tanpa batas karena buah dapat melewati tingkat kematangan optimal.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar mengapa harga TBS turun, melainkan apakah risiko telah dibagi secara proporsional di sepanjang rantai pasok. Ketika harga CPO naik, manfaatnya tidak selalu cepat sampai ke kebun. Sebaliknya, ketika pasar terkoreksi, dampaknya sering lebih dahulu dirasakan petani.

Persoalan ini tidak perlu dibaca sebagai pertentangan antara petani dan industri. Pabrik membutuhkan TBS, petani membutuhkan pabrik, eksportir membutuhkan pasokan, dan negara membutuhkan sawit sebagai sumber devisa, pangan, energi, serta ekonomi rakyat. Namun, hubungan yang saling bergantung tidak otomatis menghasilkan pembagian risiko yang adil.

Karena itu, transparansi formula harga TBS perlu diperkuat, termasuk harga CPO dan inti sawit, rendemen, serta indeks “K”. Informasi tersebut perlu tersedia melalui *dashboard* yang mudah diakses petani, tidak hanya beredar dalam rapat penetapan harga.

Saat terjadi disrupsi besar, pemerintah juga perlu memiliki protokol pengamanan pembelian TBS agar ketidakpastian di tingkat ekspor tidak serta-merta menghentikan penyerapan buah di tingkat kebun. Pada saat yang sama, koperasi perlu diperkuat sebagai agregator TBS dan penghubung kontrak dengan PKS, bukan sekadar lembaga administratif.

Ketahanan industri sawit tidak cukup hanya dijaga melalui kelancaran ekspor dan stabilitas industri hilir. Ketahanan itu juga ditentukan oleh kemampuan melindungi mata rantai yang memiliki ruang tawar paling terbatas. Jika setiap guncangan terus berakhir pada penurunan harga di tingkat petani, berarti risiko industri belum benar-benar dibagi, melainkan hanya diteruskan ke hulu. (FZN)

Sawit dalam Peta SAF Global: Dari POME Oil, OPT, hingga Pengakuan CORSIA

Pertarungan masa depan *Sustainable Aviation Fuel* atau SAF tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi bahan bakar rendah karbon, tetapi juga oleh kemampuan memengaruhi cara bahan baku dinilai. Di titik inilah Indonesia perlu hadir lebih aktif dalam diplomasi teknis global. Sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, posisi sawit Indonesia tidak lagi cukup diperdebatkan dalam isu ekspor versus domestik atau pangan versus energi. Sawit mulai masuk ke arena yang lebih menentukan: *life cycle assessment* atau LCA, klasifikasi *feedstock*, emisi tidak langsung akibat perubahan penggunaan lahan atau *induced land use change* (ILUC), serta pengakuan dalam skema CORSIA.

Rangkaian agenda Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, melalui ICAO CAEP Working Group 5 di Bali pada 6–10 Juli 2026 dan EASA ASEAN SAF Workshop pada 13–15 Juli 2026 memberi sinyal bahwa Indonesia mulai dilihat sebagai negara yang proaktif dalam pengembangan SAF berbasis *feedstock* tropis. Pandangan dari berbagai ahli, termasuk Airbus, IATA, JCAB, dan Sekretariat ICAO WG5, memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam agenda SAF kawasan.

Namun, nilai strategisnya bukan terletak pada seremoni internasional, melainkan pada pengalaman teknis yang mulai terbentuk. Pengusulan POME oil dan batang kelapa sawit atau *Oil Palm Trunk* (OPT) memperlihatkan bahwa *feedstock* berbasis sawit dapat masuk ke sistem global apabila dibawa dengan data, metodologi, dan argumentasi ilmiah yang disiplin. POME oil mengikuti jalur penetapan default LCA value, sementara OPT mengikuti jalur klasifikasi *feedstock* dalam daftar positif CORSIA. Keduanya menunjukkan bahwa diplomasi sawit ke depan tidak cukup dilakukan melalui narasi, tetapi harus melalui pembuktian teknis.

Keberhasilan pengusulan POME oil tidak terlepas dari kolaborasi teknis industri domestik, khususnya IPOSS dan Tripatra, dengan ahli global dari Hasselt University, Belgia, serta *Joint Research Centre* (JRC) Uni Eropa. Melalui jalur SAF HEFA, POME oil diakui memiliki default *Core LCA value* sebesar 18,1 gCO₂e/MJ. Ini membuktikan bahwa residu dari sistem pengolahan sawit dapat memperoleh pengakuan global ketika sistem *boundary LCA*, data, dan proses verifikasi kredibel. Dengan kata lain, *feedstock* sawit dapat diterima karena adanya metodologi yang dapat diuji. OPT memberi pelajaran lain. Melalui kerja sama Jepang–

Indonesia, OPT diajukan sebagai *agricultural residue* dari siklus peremajaan sawit. Dalam proses ini, Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara pemilik bahan baku, tetapi juga sebagai pihak yang memahami kondisi lapangan: bagaimana OPT dihasilkan, bagaimana siklus *replanting* bekerja, apa batasan *feedstock*-nya, dan mengapa batang sawit memiliki potensi sebagai bahan baku SAF. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya negara produsen hadir dalam penyusunan standar, bukan sekadar menerima hasil penilaian dari luar.

Karena itu, POME oil dan OPT tidak dapat dibaca sebagai capaian yang berdiri sendiri. Keduanya merupakan *entry point* Indonesia untuk masuk lebih jauh dalam diplomasi teknis ICAO. Kedua pengalaman ini dapat membuka ruang bagi riset *feedstock* SAF berbasis sawit lainnya di masa depan.

Di sinilah Indonesia dapat masuk pada agenda yang lebih strategis, yakni mendorong pelibatan negara produsen bahan baku dalam proses penilaian ILUC yang selama ini dianggap belum cukup transparan. Tujuannya bukan semata memperoleh nilai emisi yang lebih rendah, tetapi memastikan adanya keadilan kuantitatif dalam metodologi.

Untuk mewujudkan sawit sebagai bagian dari rantai pasok SAF global, implikasi kebijakan domestiknya cukup jelas. Indonesia perlu membenahi tata kelola dan tata niaga *feedstock*, membangun skema *traceability*, memperbarui inventori data LCA nasional, dan menyiapkan rantai pasok SAF yang lebih stabil dan reliable sekaligus memenuhi skema keberlanjutan ICAO. Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas serta penyelesaian persoalan agraria, pertanahan, dan kehutanan juga menjadi bagian penting dari agenda SAF Indonesia ke depan.

Dengan demikian, pengakuan POME oil dan OPT dalam kerangka CORSIA bukan akhir proses, melainkan awal babak baru diplomasi teknis sawit Indonesia. SAF memberi ruang bagi Indonesia untuk mengangkat keunggulan *feedstock* nasional, sekaligus mendorong tata kelola sawit agar lebih siap menghadapi standar global.

Jika momentum ini dijaga, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga aktor SAF yang ikut membentuk masa depan kemajuan dekarbonisasi penerbangan global yang lebih transparan, inklusif, dan adil secara kuantitatif. (DHP)

EUDR dan Petani Swadaya: Membangun Model Kepatuhan Bersama untuk Menjaga Daya Saing

Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mengubah cara pasar global menilai produk sawit. Akses pasar tidak lagi hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan membuktikan asal-usul bahan baku hingga ke titik kebun. Produk sawit yang memasuki pasar Uni Eropa harus dapat dibuktikan tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020, diproduksi sesuai hukum negara asal, serta didukung dokumen *due diligence* yang dapat diverifikasi.

Bagi Indonesia, regulasi ini menjadi penting karena Uni Eropa merupakan salah satu pasar strategis bagi produk sawit bernilai tambah, terutama produk olahan dan oleokimia. Namun, memenuhi tuntutan EUDR bukanlah hal yang sederhana. Persyaratan ketertelusuran (*traceability*) membuat kepatuhan merentang dari eksportir hingga petani sebagai mata rantai awal dalam sistem pasok sawit. Dengan demikian, tantangan EUDR pada dasarnya bukan hanya persoalan akses pasar, tetapi juga bagaimana membangun sistem kepatuhan bersama yang mampu menghubungkan seluruh pelaku dalam rantai pasok secara terpadu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi EUDR bukan semata memenuhi persyaratan regulasi, melainkan membangun sistem kepatuhan yang mampu melibatkan seluruh pelaku dalam rantai pasok. Karena itu, pengembangan sistem kepatuhan bersama menjadi agenda yang semakin mendesak, terutama karena kesiapan pekebun sawit rakyat masih terbatas dalam memenuhi berbagai persyaratan dasar, mulai dari sertifikasi, audit pemasok, ketertelusuran, hingga legalitas kebun. Dalam kondisi seperti ini, petani swadaya menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi implementasi EUDR.

Bagi petani swadaya, risiko terbesar bukan semata-mata sanksi hukum, melainkan kehilangan akses secara bertahap ke rantai pasok ekspor. Mereka dapat tersisih dari pasar Uni Eropa bukan karena terbukti melakukan deforestasi, melainkan karena belum mampu membuktikan legalitas kebunnya sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Apabila kondisi ini dibiarkan, implementasi EUDR berpotensi menciptakan dual market di dalam rantai pasok sawit Indonesia, yaitu pasokan yang memenuhi persyaratan mengalir ke pasar Uni Eropa, sedangkan pasokan yang belum terdokumentasi terdorong ke pasar dengan persyaratan lebih longgar dan posisi tawar yang lebih lemah.

Karena itu, respons terhadap EUDR tidak cukup hanya berupa sosialisasi atau mendorong petani memenuhi berbagai persyaratan secara sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah

pendekatan baru: membangun kepatuhan secara kolektif di sepanjang rantai pasok. Pendekatan tersebut disebut sebagai Model Kepatuhan Bersama, yaitu suatu kerangka yang membantu petani memenuhi persyaratan EUDR melalui pendataan, pemetaan, verifikasi, pendampingan, dan integrasi data.

Model tersebut dapat diwujudkan melalui Hub Kepatuhan Petani Swadaya. Dalam skema ini, koperasi, gapoktan, atau PKS tidak hanya berfungsi sebagai pembeli TBS, tetapi juga sebagai pengelola kepatuhan yang membantu petani menyiapkan data dan ketertelusuran yang dibutuhkan dalam proses pembuktian EUDR. Dengan demikian, beban pemenuhan legalitas dan ketertelusuran tidak lagi ditanggung oleh masing-masing petani secara sendiri-sendiri.

Dalam proses tersebut, kebun dapat dikelompokkan ke dalam tiga status sederhana. Hijau menunjukkan persyaratan dasar telah terpenuhi. Kuning menunjukkan data atau legalitas masih perlu diperbaiki. Merah menunjukkan adanya persoalan mendasar yang harus diselesaikan sebelum masuk rantai pasok EUDR. Klasifikasi ini bukan sertifikat otomatis untuk memasuki pasar Uni Eropa, melainkan instrumen nasional yang membantu proses pembinaan petani sekaligus memperkuat penyusunan dokumen *due diligence* oleh pelaku usaha.

Keberhasilan model ini bergantung pada pembagian peran yang jelas. Pemerintah pusat bertugas mengintegrasikan kebijakan dan sistem informasi, pemerintah daerah melakukan validasi lapangan dan pembinaan petani, sedangkan koperasi, gapoktan, dan PKS menjadi pengelola kepatuhan di tingkat rantai pasok melalui pendampingan, pengelolaan data, dan verifikasi pemasok.

Model ini juga memerlukan dukungan pembiayaan. Biaya pemetaan, validasi data, dan pendampingan petani tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada petani. Dukungan BPDP, Dana Bagi Hasil Sawit, APBD, maupun kemitraan perusahaan perlu diarahkan untuk memperkuat sistem kepatuhan di tingkat koperasi, gapoktan, dan PKS.

Dengan demikian, tantangan EUDR pada akhirnya bukan sekadar memenuhi persyaratan perdagangan internasional, melainkan membangun sistem kepatuhan nasional yang mampu melibatkan seluruh pelaku rantai pasok secara inklusif. Melalui Model Kepatuhan Bersama, EUDR tidak hanya menjadi instrumen perdagangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola sawit rakyat sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global. (MA)

Menata Ulang Keberlanjutan Pabrik Kelapa Sawit Berbasis Neraca TBS Wilayah

Persoalannya bukan terletak pada PKS dengan atau tanpa kebun, melainkan keseimbangan supply TBS dan kapasitas pengolahan di wilayah

Bagi pekebun sawit, bertambahnya jumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di sekitar kebun merupakan kabar baik. Semakin banyak PKS berarti semakin banyak pilihan pembeli tandan buah segar (TBS), posisi tawar pekebun semakin kuat, serta biaya angkut dan risiko penurunan mutu buah dapat ditekan. Dalam perspektif pekebun, pertumbuhan industri pengolahan menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan.

Kebutuhan tersebut tercermin dari pesatnya pertumbuhan industri pengolahan sawit dalam dua dekade terakhir. Basis data PKS IPOSS mencatat jumlah PKS di Indonesia meningkat dari sekitar 232 unit pada tahun 2000 menjadi 1.495 unit saat ini. Selain dibangun terintegrasi dengan kebun, sebagian PKS juga berkembang tanpa memiliki kebun dan memperoleh bahan baku dari pekebun rakyat, koperasi, pedagang pengumpul, maupun perusahaan lain. Model usaha ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya produksi TBS rakyat yang membutuhkan akses pasar dan kapasitas pengolahan.

Namun, perkembangan PKS tanpa kebun juga memunculkan berbagai kekhawatiran. Di sejumlah daerah, model ini kerap dikaitkan dengan persaingan memperoleh bahan baku, dugaan praktik pencurian TBS, masuknya buah yang tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, hingga melemahnya pengendalian rantai pasok. Di sisi lain, apabila kapasitas pengolahan tumbuh melampaui ketersediaan bahan baku di suatu wilayah, tekanan persaingan untuk memperoleh TBS akan semakin meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut juga dikhawatirkan mendorong ekspansi perkebunan dan perubahan tutupan lahan guna memenuhi kebutuhan bahan baku. Akibatnya, peningkatan jumlah PKS, khususnya yang tanpa kebun, menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dalam tata kelola industri sawit nasional.

Namun, benarkah seluruh persoalan tersebut semata-mata disebabkan oleh keberadaan PKS tanpa kebun?

Pada dasarnya, persoalan bukan terletak pada apakah suatu PKS memiliki kebun atau tidak. PKS yang memiliki kebun maupun yang tidak sama-sama dapat menghadapi persoalan pasokan bahan baku. Persoalan menjadi lebih besar ketika total kapasitas pengolahan yang dibangun di suatu wilayah telah melampaui kemampuan wilayah tersebut menyediakan pasokan TBS. Pada titik tertentu, kondisi tersebut dapat

berkembang menjadi persoalan legalitas sumber buah, ketertelusuran asal-usul TBS, hingga meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan rantai pasok. Dengan demikian, pertanyaan yang seharusnya dijawab bukanlah dari mana TBS berasal atau siapa yang mengolahnya, melainkan apakah kapasitas industri pengolahan telah seimbang dengan potensi produksi TBS suatu wilayah? Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan cara pandang baru melalui Neraca TBS Wilayah, yaitu instrumen yang membandingkan potensi produksi TBS dengan total kapasitas pengolahan PKS dalam suatu wilayah.

Sebagai ilustrasi, sebuah PKS berkapasitas 30 ton TBS per jam memerlukan sekitar 6.000 hektare tanaman menghasilkan sebagai basis pasokan pada kondisi panen puncak. Apabila kebutuhan bahan baku seluruh PKS telah melampaui potensi produksi TBS wilayah tersebut, maka persaingan memperoleh bahan baku menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Dampaknya dapat berupa meningkatnya praktik persaingan yang tidak sehat antarpabrik, melemahnya disiplin grading buah, menurunnya mutu CPO, serta semakin sulitnya menjaga legalitas dan ketertelusuran asal-usul TBS dalam rantai pasok yang berkelanjutan.

Karena itu, perdebatan mengenai PKS tanpa kebun dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pendekatan penataan industri pengolahan sawit di Indonesia. Fokus kebijakan tidak lagi cukup diarahkan pada perizinan semata, tetapi juga pada keseimbangan antara kapasitas pengolahan dan kemampuan wilayah menyediakan pasokan TBS. Dalam batasan tertentu, Neraca TBS Wilayah dapat dikembangkan sebagai instrumen perencanaan dan evaluasi pembangunan PKS, sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih objektif untuk menilai kebutuhan tambahan kapasitas, mengidentifikasi wilayah yang mengalami surplus maupun defisit kapasitas, serta menyusun kebijakan yang menjaga keseimbangan antara produksi TBS dan industri pengolahannya.

Dengan demikian, keberlanjutan industri pengolahan sawit tidak lagi hanya diukur dari bertambahnya jumlah PKS atau besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa setiap kapasitas yang dibangun didukung oleh ketersediaan bahan baku di wilayah tersebut. Pada akhirnya, keberlanjutan industri pengolahan sawit bukan ditentukan oleh banyaknya pabrik yang dibangun, melainkan oleh kemampuan menempatkan kapasitas pengolahan secara tepat sesuai dengan potensi produksi TBS setiap wilayah. (DS)

Kebutuhan CPO untuk B50: Seberapa Aman Pasokan Q3?

Implementasi B50 sejak 1 Juli 2026 mengubah peta kebutuhan CPO Indonesia pada Q3 2026. Kebijakan ini memperbesar serapan domestik untuk biodiesel pada saat produksi minyak sawit nasional diproyeksikan melemah. Karena itu, B50 tidak cukup dibaca sebagai agenda energi, tetapi juga sebagai persoalan neraca pasokan: apakah produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan stok masih berada dalam keseimbangan yang aman.

Dari sisi produksi, pasokan Q3 2026 diperkirakan lebih ketat dibandingkan pola normal. IPOSS memproyeksikan produksi minyak sawit nasional, termasuk CPO dan PKO, pada Juli–September 2026 sekitar 11,1 juta ton. Angka ini lebih rendah dari kisaran historis Q3 yang umumnya berada pada 12–14 juta ton. Tekanan terutama terjadi pada Juli dan September, dengan faktor iklim menjadi salah satu penyebab utama, termasuk kondisi kering akibat sinyal ENSO dan IOD positif yang dapat meningkatkan stres tanaman dan memengaruhi fase fisiologisnya.

Pada saat yang sama, konsumsi domestik justru meningkat. Total konsumsi minyak sawit domestik pada Q3 2026 diproyeksikan mencapai 7,2 juta ton, naik 12,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi pangan dan oleokimia relatif terbatas, hanya sekitar 30 ribu ton. Sebaliknya, kebutuhan biodiesel diperkirakan menyerap sekitar 4,25 juta ton CPO, atau meningkat sekitar 790 ribu ton dibandingkan kuartal III 2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan pasokan tidak hanya berasal dari produksi yang lebih rendah, tetapi juga dari perubahan struktur permintaan domestik. B50 membuat biodiesel menjadi komponen dominan dalam konsumsi minyak sawit nasional. Secara strategis, hal ini memperkuat pasar domestik dan mendukung ketahanan energi. Namun secara neraca, tambahan kebutuhan CPO untuk biodiesel mengurangi ruang alokasi ekspor dan pembentukan stok.

Dampaknya terlihat pada prospek ekspor. Total ekspor produk sawit nasional pada Q3 2026, mulai dari minyak sawit hingga produk turunannya, diperkirakan turun menjadi sekitar 4,35 juta ton. Angka ini jauh di bawah realisasi Q3 2025 yang mencapai 8,32 juta ton. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa implementasi B50 berimplikasi langsung terhadap ketersediaan pasokan untuk pasar ekspor. Ketika kebutuhan domestik meningkat, sebagian pasokan yang sebelumnya dapat dialokasikan ke pasar global harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Stok menjadi indikator yang paling sensitif. Stok akhir Q3 2026 diperkirakan sekitar 1,1 juta ton. Angka ini memang lebih baik dibandingkan titik rendah kuartal I 2026 yang sekitar 0,6 juta ton, tetapi masih jauh di bawah level 2024–2025. Stok yang rendah mempersempit bantalan pasokan jika terjadi gangguan produksi, lonjakan konsumsi, atau tekanan distribusi. Di pasar global, rendahnya stok Indonesia juga berpotensi memperkuat sentimen kenaikan harga CPO.

Dengan demikian, risiko utama Q3 2026 terletak pada waktu implementasi B50 yang bertepatan dengan kondisi pasokan yang lebih terbatas. Peningkatan serapan biodiesel mengurangi ruang ekspor dan memperlambat pemulihan stok. Jika produksi tidak segera pulih, penyesuaian neraca kemungkinan akan terjadi melalui ekspor yang lebih rendah, stok yang tetap tipis, atau tekanan harga yang lebih kuat.

B50 tetap penting bagi ketahanan energi dan penguatan pasar domestik. Namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, ekspor, dan stok. Pemerintah perlu memantau neraca CPO secara bulanan, menetapkan batas stok minimum nasional, menyiapkan mekanisme pemicu kebijakan ketika stok turun di bawah batas aman, serta memastikan alokasi pasokan agar kebutuhan pangan dan oleokimia tidak terganggu. Dengan cara itu, B50 dapat tetap berjalan tanpa memperbesar tekanan pada pasar domestik. (RFY)



Implementasi B50 : Instrumen Percepatan Transformasi Produktivitas Sawit Nasional

Implementasi mandatori biodiesel B50 pada Semester II-2026 menandai peningkatan peran pasar domestik dalam industri sawit Indonesia. Kebijakan ini diproyeksikan menambah kebutuhan Crude Palm Oil (CPO) sekitar 1,7 juta ton sehingga total kebutuhan biodiesel mencapai sekitar 15,7 juta ton ekuivalen CPO per tahun. Akibatnya, persaingan penggunaan CPO semakin ketat karena harus memenuhi kebutuhan pangan, oleokimia, energi, dan ekspor secara bersamaan.

Proyeksi IPOSS menunjukkan bahwa implementasi B50 mendorong perubahan struktur pemanfaatan CPO nasional. Pada Semester I-2026 saat B40 masih berlaku, porsi ekspor diperkirakan mencapai 53% dari total pemanfaatan CPO, sementara biodiesel sekitar 25%. Setelah B50 diterapkan, porsi biodiesel meningkat menjadi sekitar 34% dan porsi ekspor berpotensi turun menjadi 42%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang ekspor akan semakin tertekan apabila peningkatan konsumsi domestik tidak diimbangi oleh pertumbuhan produksi.

Namun, mengurangi ekspor bukanlah solusi yang berkelanjutan. Selain berpotensi menekan devisa, langkah tersebut juga dapat mengurangi penerimaan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) yang menjadi sumber utama pendanaan program biodiesel melalui BPDP.

Dalam simulasi IPOSS, dengan volume penyaluran B50 sekitar 4,9 juta kiloliter per kuartal, setiap pelebaran selisih Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan solar sebesar Rp100 per liter dapat meningkatkan kebutuhan dana hingga sekitar Rp490 miliar. Artinya, keberlanjutan B50 sangat bergantung pada kemampuan menjaga pasokan CPO sekaligus mempertahankan basis penerimaan sektor sawit. Dalam konteks tersebut, peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi strategi yang lebih tepat dibandingkan mengalihkan alokasi CPO dari ekspor ke domestik. Kebun rakyat menguasai sekitar 42% areal sawit nasional atau sekitar 7 juta hektare. Dengan luasan tersebut, kenaikan produktivitas sebesar 0,25 ton CPO per hektare saja berpotensi menambah produksi sekitar 1,75 juta ton CPO per tahun, setara dengan tambahan kebutuhan akibat implementasi B50.

Potensi ini akan semakin besar melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik. Peningkatan produktivitas rata-rata 0,5 ton CPO per hektare dapat menghasilkan tambahan 3,5 juta ton CPO per tahun, sedangkan kenaikan 1 ton per hektare berpotensi menambah produksi hingga 7 juta ton. Tambahan pasokan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan biodiesel, tetapi juga menjaga



daya saing ekspor dan mendukung pengembangan industri hilir sawit. Namun, peningkatan produktivitas tidak dapat dicapai secara instan. Masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses pembiayaan, penggunaan benih non-unggul, serta lambatnya pelaksanaan peremajaan pada sebagian kebun rakyat.

Karena itu, isu strategis industri sawit Indonesia saat ini bukan lagi perluasan areal, melainkan percepatan peningkatan produktivitas, terutama pada perkebunan rakyat. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul bersertifikat, penguatan pembiayaan, dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) menjadi instrumen penting untuk mempersempit kesenjangan produktivitas.

Dengan demikian, masa depan B50 tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar CPO dapat dialihkan ke pasar domestik, tetapi oleh kemampuan Indonesia memperbesar kapasitas produksinya tanpa memperluas areal.

Karena itu, B50 dan ekspor tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya perlu ditopang oleh strategi peningkatan produktivitas yang serius, terukur, dan berkelanjutan, terutama pada perkebunan rakyat. Agenda ini membutuhkan paket kebijakan lintas kementerian yang mengintegrasikan peremajaan, benih unggul, pembiayaan, sarana produksi, pendampingan teknis, dan kepastian pasar. Korporasi juga perlu mengambil peran lebih besar melalui kemitraan, transfer teknologi, pembinaan budidaya, serta penguatan akses petani terhadap input dan pasar. Dengan strategi tersebut, B50 tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi, tetapi juga momentum untuk mempercepat transformasi produktivitas sawit nasional sekaligus menjaga daya saing ekspor. (SN)

IPOSS INSIGHTS

Pembina: **Darmin Nasution, Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**, Pemred: **M. Rumi Djalil**, Redaktur: **Dimas HP**, Staf Redaksi: **Dwivayani, Faridl, Raisya, Aura, Sylvia, Jennifer, Alya, Fikri**, Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
JI Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id